

REVIU

RENCANA KINERJA TAHUNAN

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA
KERJA TAHUN 2019-2020



PENGADILAN NEGERI SINGKIL

JL. SINGKIL-SUBULUSSALAM KM. 20 TELP. 0658-21283 FAX. 0658-21283
Email. pn_singkil@yahoo.co.id Web. pn-singkel.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pengadilan Negeri Singkil dapat menyelesaikan Reviu Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dimana setiap Kementerian Lembaga dan Satuan Kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi.

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Singkil memuat angka target kinerja tahun 2018-2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018-2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Singkil ini, berpedoman kepada Blue Print atau Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, Rencana Strategis Pengadilan Singkil 2018-2020, Pencapaian Kinerja Tahun 2018, serta Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Negeri Singkil.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan penetapan rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018-2020 ini, semoga kita semua dapat bekerjasama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2018 ini dengan baik.

Singkil, 13 Februari 2019

(PENGDILAN NEGERI SINGKIL)
KETUA,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H
NIP. 19600713 198303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN	3
A. REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018	4
B. REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019	6
C. REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020	8
BAB III. PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman disamping aparat hukum (Hakim, Panitera, Juru Sita) dan sarana hukum yang harus dijadikan rujukan hukum formil dan materil. Badan peradilan yang ada di Indonesia terdiri dari empat lingkungan peradilan yaitu (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman secara administratif dan finansial berada dibawah pembinaan Mahkamah Agung RI

Di lingkungan peradilan umum, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Singkil mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkil tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai pelaksana Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Singkil mempunyai visi yang menginduk kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Singkil yang Agung".

Pengadilan Negeri Singkil sebagai pelaksana Pelayanan Publik dalam hal pelayanan dan Penegakan Hukum harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Agar dapat terukur dengan baik, Pengadilan Singkil haruslah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai kinerja dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama 1 (satu) Tahun.

Selain itu Rencana Kinerja Tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Singkil untuk dapat mengevaluasi capaian kinerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Singkil menurun, pimpinan dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Singkil telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018-2019 ini sebagai tolak ukur pencapaian kerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 yakni sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2019 serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor W1.U/340/OT.01.2/XI/2018 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Singkil 2015-2019 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Negeri Singkil telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoma Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja Tahunan) Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Singkil Tahun 2019 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Singkil tahun 2018-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2019 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Singkil dalam membangun sebuah sitem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kinerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Singkil adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu.	84 Perkara	Rp. 27.826.000,-
	b. Persentase perkara: - Pidana - Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	90 % 85 %					
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: - Pidana - Perdata	100% 100%					
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	95% 90% 95%					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%					
	f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	85%					

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus</p>	<p>100%</p> <p>40%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	5Layanan	Rp. 500.000,-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Biaya Penyelesaian Perkara	2 Perkara	Rp. 1.460.000,-
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Minutasi	22 Perkara	Rp. 1.100.000,-

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu.	128 Perkara	Rp. 86.118.000,-
	b. Persentase perkara: - Pidana - Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	90 % 85 %					
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: - Pidana - Perdata	15% 10%					
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	75% 80% 95%					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	50%					
	f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	100%					

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus</p>	<p>100%</p> <p>20%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	1 Layanan	Rp. 86.118.000,-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</p>	<p>100%</p> <p>0%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Biaya Penyelesaian Perkara	2 Perkara	Rp. 1.460.000,-
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Minutasi	128 Perkara	Rp. 12.800.000,-

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI SINGKIL TAHUN 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu.	128 Perkara	Rp. 86.118.000,-
	b. Persentase perkara: - Pidana - Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	95 % 90 %					
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara: - Pidana - Perdata	100% 100%					
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	98% 98% 98%					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%					
	f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	90%					

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus</p>	<p>100%</p> <p>42%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	1 Layanan	Rp. 86.118.000,-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Biaya Penyelesaian Perkara	2 Perkara	Rp. 1.460.000,-
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Minutasi	128 Perkara	Rp. 12.800.000,-

BAB III PENUTUP

Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2018-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Singkil terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Singkil sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Singkil Tahun 2018 dan 2019 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan 2019, yang juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Singkil, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.